TRIBUN PONTIANAK

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2019	Hal.: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

KPK Bidik Korupsi di Melawi dan Bengkayang

■ Koordinasi dengan Polri-BPK Kalbar

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polri dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di gedung KPK, Jakarta. Kegiatan itu untuk membahas dua penyidikan kasus korupsi di Kalimantan Barat.

"KPK dalam menjalankan tugas koordinasi dan supervisi hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polda Kalimantan Barat dan Bareskrim dengan auditor BPK RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (19/6) seperti dilansir dari Antara.

Pertemuan itu dihadiri Tim Satgas Penindakan Koordinasi Wilayah IV KPK, sedang-

■ Bersambung **ke hal. 7**

TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | (Jun) | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

20 19

Hal.: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (20) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KPK Bidik Korupsi di Melawi

Sambungan **Hal.1**

kan dari pihak Polda Kalbar dipimpin oleh Kasubdit Tipidkor AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo dan dari Bareskrim dihadiri oleh AKBP Sumarni dan AKBP Sugiyanto serta tim auditor dari BPK RI.

Febri menyatakan rapat koordinasi itu membahas penanganan perkara dugaan korupsi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi Sumber yang menggunakan Dana APBD Tahun Anggaran 2012-2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp 13 miliar.

Kemudian, dugaan korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran Rp 20 miliar.

"Untuk kasus pembangunan Masjid Agung Melawi penyidikan telah dilakukan sejak 2016, sedangkan kasus dana bantuan khusus desa di Kabupaten Bengkayang telah dilakukan penyidikan sejak 2018 lalu," ungkap Febri.

Menurut dia, sebagaimana amanat yang diberikan undang-undang, dalam menjalankan fungsi "trigger mechanism" KPK memfasilitasi pertemuan pihak penyidik dan auditor BPK RI dan memberikan dukungan menghadirkan ahli serta dukungan lain yang dibutuhkan oleh tim.

"Koordinasi dan supervisi ini dilakukan agar hambatan-hambatan yang terjadi dapat diselesaikan sehingga tahap penanganan perkara bisa masuk ke tahap berikutnya. Saat ini, proses penanganan perkara masih tahap penyidikan, mengumpulkan alat bukti serta proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK RI," tuturnya.

Ia menyatakan kegiatan koordinasi pada Rabu ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi sebelumnya pada 20 Februari 2019 di Mapolda Kalbar. "Penetapan tersangka akan dilakukan setelah sejumlah tahapan ini selesai dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," ujar Febri.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan kegiatan koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi di tiga provinsi; yaitu Kalbar, Riau, dan Sulawesi Utara (Sulut). Kegiatan berlangsung selama satu minggu ini, mulai Senin 22 April 2019. "Untuk Kalbar, KPK mendorong optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah di pemerintah daerah se-Kalbar. Dua upaya ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional dan Bank Kalimantan Barat," kata Febri.

Sementara itu terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi di Melawi dan Bengkayang yang dilakukan Ditreskrimsus, saat ini Polda Kalbar, masih berkoordinasi dengan KPK dan BPK RI. Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Mahyudi Nazriansyah mengatakan pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan dua lembaga negara tersebut.

Selain dengan KPK RI, Ditreskrimsus Polda Kalbar masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Masih menunggu hasil PKN dari BPK RI," ujar, Rabu (19/6).

Ia mengatakan KPK melakukan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polri dan auditor BPK RI membahas dua penyidikan kasus korupsi di Kalbar.

Dihubungi terpisah Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan pihaknya akan tetap menangani kedua perkara Tipikor yang sebelumnya sudah diproses Ditreskrimsus Polda Kalbar. "Kedua kasus itu sudah dalam proses oleh anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar," tegas Kapolda Irjen Pol Didi Haryono.

Kapolda menegaskan, karena perkara ini sudah dalam proses di Ditreskrimsus Polda Kalbar, maka selanjutnya akan tetap ditangani Polda Kalbar. **(hdi/ant)**